

maklumat atau program prioritas daerah secara berjenjang.

- Optimalisasi kemitraan bersama komunitas pemuda dan jurnalis warga lokal untuk mempercepat amplifikasi konten berita resmi di akar rumput.

b. Faktor penghambat

- Masih adanya kesenjangan geografis (wilayah *blank spot*) dan tingkat literasi digital sebagian masyarakat perdesaan pelosok dalam memilah informasi resmi dari pemerintah daerah.
- Tingginya paparan informasi tidak valid (hoaks) di platform digital umum yang berpotensi mendistorsi pemahaman masyarakat terhadap esensi kebijakan asli pemerintah.

c. Rekomendasi tindak lanjut

- Mengoptimalkan peran aktif Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat desa melalui pembinaan pembuatan konten lokal untuk menjangkau masyarakat yang minim akses internet digital.

9. Persentase Layanan Publik Secara Elektronik

Indikator Persentase Layanan Publik secara Elektronik pada Triwulan I mencatatkan realisasi sebesar 55,73% dari target tahunan sebesar 75% (Tingkat Capaian 55,73% dengan predikat Sedang).

a. Faktor pendorong

- Adanya regulasi daerah yang kuat dan peta rencana (*roadmap*) tata kelola pemerintahan digital yang jelas dari pimpinan daerah
- Penyediaan pusat data terpadu (*Data Center*), jaringan fiber optik, dan fasilitas *cloud* yang stabil untuk mendukung operasional aplikasi layanan publik.
- Sinergi yang solid antara Dinkominfo dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengalihmediakan layanan manual menjadi digital.
- Penerapan sertifikat elektronik (tanda tangan digital) dan audit keamanan siber secara berkala yang meningkatkan rasa aman masyarakat dalam bertransaksi digital.

- SDM TIK yang mumpuni dalam melaksanakan proses digitalisasi layanan SPBE.
- b. Faktor penghambat
 - Kurangnya respon dari penyelenggara layanan publik dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE pada perangkat daerah.
 - Masih maraknya serangan siber (seperti *ransomware* atau *deface*) yang mengancam stabilitas server data pelayanan publik daerah.
 - Sebagian kelompok masyarakat, khususnya lansia dan warga di pelosok, belum mampu mengoperasikan aplikasi layanan mandiri.
- c. Rekomendasi tindak lanjut
 - Menerapkan standar pengamanan data yang ketat, melakukan *backup* data rutin di Pusat Data Nasional (PDN), serta memasang sistem deteksi ancaman siber.
 - Menyediakan pusat pelayanan digital di tingkat kecamatan atau desa dilengkapi petugas pendamping untuk membantu warga lansia dan awam teknologi dalam mengakses layanan.

10. Persentase Kinerja Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang Baik

Persentase Kinerja Infrastruktur TIK tercatat terealisasi sebesar 100% dari target yang tertuang dalam dokumen perencanaan sebesar 37,68% (Tingkat Capaian 100% dengan predikat Sangat Tinggi). Performa fisik infrastruktur yang andal ini didorong oleh beberapa faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:

- a. Faktor pendorong
 - Dukungan kebijakan pemerintah daerah yang konsisten terhadap penguatan infrastruktur TIK dan SPBE.
 - Pelaksanaan pemeliharaan (*maintenance*) rutin pada kabel serat optik (*fiber optic*) dan perangkat jaringan penunjang konektivitas antar-OPD.
 - Penyediaan ruang server yang memadai, dilengkapi sistem pendingin kontrol, catu daya cadangan (*UPS*), dan proteksi kebakaran standar.

- Penerapan protokol keamanan siber yang ketat, termasuk pemasangan tembok api (*firewall*), enkripsi data, dan koordinasi aktif dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara).
 - Pembagian dan pengaturan kapasitas pita lebar (*bandwidth*) internet secara adil sesuai berdasarkan skala prioritas kebutuhan operasional masing-masing instansi.
 - Adanya dukungan dari tim teknis dan pranata komputer yang kompeten dalam menangani gangguan jaringan (*troubleshooting*) secara cepat di lapangan.
- b. Faktor penghambat
- Sebagian perangkat jaringan (*switch, router, atau UPS*) di beberapa titik OPD sudah berumur dan mengalami penurunan performa teknis.
 - Kompleksitas serangan siber modern membutuhkan sistem proteksi yang mahal dan pembaruan lisensi keamanan yang kontinu
 - Proses perbaikan gangguan jaringan atau *bandwidth* utama sering kali bergantung pada respons vendor penyedia jasa internet (ISP).
 - Kesenjangan SDM TIK di beberapa OPD, khususnya kemampuan teknis dan literasi digital
- c. Rekomendasi tindak lanjut
- Memperkuat kemampuan SDM dengan pelatihan di bidang keamanan siber, literasi digital, serta pendampingan teknis untuk admin SPBE di setiap OPD.
 - Memperbarui sistem keamanan *firewall*, melakukan audit berkala bersama BSSN, serta mengadakan simulasi penanganan insiden siber secara rutin.
 - Mempertegas poin kerja sama dengan vendor penyedia ISP untuk memastikan waktu perbaikan gangguan berjalan lebih cepat dan responsif.

11. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet mencatatkan realisasi yang melampaui target, yakni sebesar 94,24% dari target tahunan sebesar 91,50% (Tingkat Capaian 100% dengan predikat Sangat Tinggi). Tingginya angka

penetrasi internet ini disebabkan oleh daya tarik pasar komersial yang memicu provider fiber optik swasta memperluas jaringan hingga perumahan/pemukiman penduduk, ditunjang program wifi gratis pemda di fasilitas publik.

a. Faktor pendorong

- Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dan merambah semua lini kehidupan yang membuat masyarakat menyesuaikan pemenuhan akan kebutuhan akses informasi dan komunikasi secara digital, serta tingkat harga alat-alat TIK yang semakin terjangkau.
- Meningkatnya ketergantungan rumah tangga terhadap internet untuk kebutuhan pendidikan (sekolah daring), ekonomi (UMKM digital), dan akses layanan publik elektronis.

b. Faktor penghambat

- Kondisi geografis Kabupaten Temanggung yang berbukit-bukit yang menjadikan masih adanya *blankspot*, susah sinyal dan juga menjadikan belum semua daerah terlayani jaringan internet dari provider
- Kurangnya pemahaman sebagian anggota keluarga (khususnya orang tua) mengenai cara menggunakan internet secara produktif dan aman.

c. Rekomendasi tindak lanjut

- Meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi pemanfaatan internet kepada masyarakat dalam memanfaatkan layanan publik secara digital.
- Menambah titik-titik WiFi gratis di fasilitas publik strategis, seperti balai desa, pos kamling modern, ruang terbuka hijau, dan pusat pembelajaran masyarakat di dusun terpencil.

12. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

Indikator ini mencatatkan realisasi sempurna sebesar 100%, berhasil memenuhi target kinerja tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 100%. Konsistensi performa ini terjaga dengan baik sejak tahun 2025 (100%), sehingga menempatkan

indikator ini pada skala peringkat Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan seluruh instansi telah mengintegrasikan data statistik sebagai basis legal penyusunan dokumen perencanaan.

a. Faktor Pendorong

- Adanya regulasi internal yang mewajibkan penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD berbasis data sektoral yang valid.
- Kemudahan akses terhadap rilis indikator makro daerah yang disediakan melalui portal data bersama.

b. Faktor Penghambat

- Dokumen pendukung data sektoral yang dikirimkan oleh beberapa OPD selaku produsen data formatnya belum seragam.
- Tantangan dalam menyelaraskan jadwal rilis data terbaru dari lembaga vertikal dengan linimasa penyusunan dokumen perencanaan daerah.

c. Rekomendasi tindak lanjut

- Menyusun pedoman teknis dan kamus data daerah yang selaras dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
- Mengoptimalkan forum koordinasi pra-perencanaan untuk menyamakan persepsi data yang akan digunakan.

13. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

Indikator ini meraih realisasi penuh sebesar 100%, menyamai target tahunan 2026 yang berada di angka 100%. Capaian triwulanan ini sukses mempertahankan tren positif dari realisasi tahun 2025 (100%) dan dikategorikan ke dalam peringkat Sangat Tinggi.

a. Faktor Pendorong

- Berjalannya sistem repositori data sektoral yang mempermudah tim penilai mengecek serta memvalidasi indikator capaian kinerja.
- Meningkatnya kesadaran perencana OPD untuk melakukan evaluasi berbasis fakta (evidenced-based evaluation) daripada asumsi.

- Menyelenggarakan kampanye kesadaran keamanan informasi terpadu bagi seluruh aparaturnya pengguna aplikasi pemerintahan agar meminimalkan celah kelalaian internal.
- Meningkatkan standardisasi enkripsi pada dokumen dinas yang bersifat rahasia atau terbatas sebelum didistribusikan melalui jaringan lokal.
- Melakukan penyelarasan berkala antara pemenuhan indikator dasar (Tingkat Keamanan Pemerintah) dengan pembaruan instrumen penilaian komprehensif pada Indeks KAMI versi terbaru.

C. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

1. Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet Melalui Jaringan Fiber Optik
 - a. Analisis capaian: Realisasi kinerja indikator ini pada Triwulan I 2026 berhasil mencapai 100%, melampaui target tahunan 2026 yang ditetapkan sebesar 70,00%. Kinerja ini mendapatkan predikat Sangat Tinggi karena seluruh OPD utama telah berhasil terintegrasi secara fisik melalui jaringan kabel serat optik daerah.
 - b. Faktor pendorong: Konsistensi pemeliharaan infrastruktur secara berkala oleh tim teknis Dinkominfo, serta perluasan jalur FO yang berkolaborasi dengan penyedia jaringan logikal daerah.
 - c. Faktor penghambat: Kerentanan fisik kabel FO luar ruang terhadap gangguan eksternal seperti bencana alam (pohon tumbang/tanah longsor di area berbukit) atau aktivitas lainnya.
 - d. Rekomendasi tindak lanjut: Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalur jaringan cadangan nirkabel atau rute FO alternatif guna menjaga konektivitas agar tidak putus total jika jalur utama mengalami gangguan fisik.
2. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi
 - a. Analisis capaian: Realisasi capaian kinerja hingga Triwulan I 2026 tercatat sebesar 88,91%, sedikit di atas target

tahunan 2026 yang sebesar 85,00%. Kinerja berada pada skala nilai Tinggi. Meskipun melampaui target tahun ini, integrasi penuh menuju target 2027 (90,00%) memerlukan pengawalan ketat agar kestabilan sistem terjaga.

- b. Faktor pendorong: Adanya mandat regulasi dan peta rencana (*roadmap*) Arsitektur SPBE Kabupaten Temanggung yang mendorong OPD teknis mengalihkan pelayanan manual menjadi digital ke dalam basis data terpadu.
- c. Faktor penghambat: Masih adanya ego sektoral di mana beberapa OPD membangun aplikasi pelayanan mandiri yang belum terintegrasi penuh atau belum saling berbagi pakai data.
- d. Rekomendasi tindak lanjut: Melakukan konsolidasi dan standardisasi aplikasi ke dalam satu portal layanan terpadu (*Super Apps*) Temanggung.

3. Persentase Masyarakat Sasaran Penyebaran Informasi Publik yang Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas

- a. Analisis capaian: Indikator ini mencatatkan realisasi sebesar 100% pada Triwulan I 2026, berada di atas target kinerja 2026 yang dipatok pada angka 80,75%. Capaian ini dikategorikan ke dalam peringkat Sangat Tinggi, mencerminkan efektivitas jangkauan diseminasi informasi publik di wilayah Temanggung.
- b. Faktor pendorong: Pemanfaatan strategi *multichannel* yang masif, memadukan media elektronik baru (website, media sosial resmi, LPPL Temanggung TV/FM) dengan kanal non-elektronik (media luar ruang dan pertunjukan rakyat komunikasi tatap muka).
- c. Faktor penghambat: Masih adanya kesenjangan geografis (wilayah *blank spot*) dan tingkat literasi digital sebagian masyarakat perdesaan pelosok dalam memilah informasi resmi dari pemerintah daerah.
- d. Rekomendasi tindak lanjut: Mengoptimalkan peran aktif Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat desa melalui pembinaan pembuatan konten lokal untuk menjangkau masyarakat yang minim akses internet digital.

4. Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Analisis capaian: Realisasi kinerja indikator ini berjalan stabil dan optimal mencapai angka 100% dari target 100% pada Triwulan I 2026 dengan predikat Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan kepatuhan seluruh badan publik di Temanggung dalam perencanaan berbasis data.
 - b. Faktor pendorong: Sinergi yang kuat dalam Forum Data Kabupaten Temanggung serta berjalannya Portal Satu Data Temanggung yang menyediakan data sektoral siap pakai untuk dokumen perencanaan.
 - c. Faktor penghambat: Terkadang terjadi jeda waktu pembaruan data sektoral terbaru dari OPD produsen data, sehingga perencana harus menggunakan data estimasi sementara.
 - d. Rekomendasi tindak lanjut: Menyusun dan mempertegas kalender pengumpulan data sektoral secara terjadwal agar produsen data menyetorkan data statistik sektoral lebih tepat waktu sebelum siklus perencanaan dimulai.
5. Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a. Analisis capaian: Sama halnya dengan indikator perencanaan, realisasi indikator pemanfaatan data dalam tahap evaluasi pembangunan daerah berhasil terpenuhi sebesar 100% dari target tahunan 100%. Peringkat kinerja berada pada tingkat Sangat Tinggi.
 - b. Faktor pendorong: Adanya integrasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) yang mewajibkan penyandingan target kinerja makro dan mikro daerah dengan data capaian statistik sektoral riil.
 - c. Faktor penghambat: Variasi kualitas, konsep, dan definisi data statistik sektoral antar-OPD yang terkadang belum seragam, sehingga mempersulit proses komparasi performa indikator kinerja evaluasi.
 - d. Rekomendasi tindak lanjut: Mengintensifkan bimbingan teknis bersama BPS selaku Pembina Data untuk menyusun

dan menerapkan standar data serta *metadata* yang baku bagi seluruh aparaturnya pengelola data di OPD.

6. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

- a. Analisis capaian: Realisasi kinerja indikator keamanan informasi melonjak drastis hingga 100% pada Triwulan I 2026, melampaui jauh dari target minimum tahunan yang ditetapkan sebesar 48,00%. Atas capaian lonjakan efisiensi ini, kinerja diberi peringkat Sangat Tinggi.
- b. Faktor pendorong: Penguatan kapabilitas Tim Tanggap Insiden Siber (Temanggung-CSIRT), masifnya penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi BSR di seluruh OPD, serta rutinnnya pelaksanaan uji celah keamanan (*vulnerability assessment*).
- c. Faktor penghambat: Ancaman siber global yang dinamis (seperti serangan *ransomware* atau *defacement* web judi online) serta risiko kelalaian manusia (*human error*) terkait kebocoran kata sandi admin di level bawah.
- d. Rekomendasi tindak lanjut: Mempertahankan pemenuhan standar keamanan dasar ini dengan memperbarui sistem perlindungan pusat data secara berkala, melakukan *backup* data berlapis di luar jaringan utama, serta mewajibkan implementasi verifikasi dua langkah (*2FA*) untuk seluruh akun admin sistem publik.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinkominfo dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinkominfo dari 5 (lima) indikator sasaran terdapat 2 (dua) indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - a. Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik
Hal ini disebabkan karena data capaian tersebut masih menggunakan angka capaian tahun 2025, sementara hasil penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2026 yang dikeluarkan oleh KPI Provinsi Jawa Tengah baru keluar pada akhir tahun.
 - b. Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah
Hal ini disebabkan karena nilai tersebut masih menggunakan nilai capaian tahun 2025, karena nilai hasil evaluasi AKIP tahun 2026 baru dirilis pada akhir tahun.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo, antara lain:
 - a. Belum optimalnya interoperabilitas dan ego sektoral aplikasi
Masih terdapat kendala dalam mengintegrasikan berbagai aplikasi yang dibangun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Masih terdapat beberapa sistem informasi berjalan sendiri-sendiri, sehingga menghambat integrasi data yang seutuhnya ke dalam satu portal layanan terpadu (*Super Apps*) Kabupaten Temanggung.
 - b. Tantangan geografis dan kendala area tanpa sinyal (*Blank Spot*)
Kontur wilayah Kabupaten Temanggung yang didominasi pegunungan dan perbukitan (seperti kawasan lereng Gunung Sindoro dan Sumbing) menjadi hambatan alami dalam pemerataan infrastruktur TIK. Kondisi ini memicu adanya kantong-kantong wilayah *blank spot* atau minim sinyal internet di pedesaan, yang berakibat pada belum meratanya akses informasi publik dan layanan elektronik bagi seluruh lapisan masyarakat rumah tangga.
 - c. Kerentanan infrastruktur fisik jaringan luar ruang
Jaringan serat optik (*fiber optic*) yang menghubungkan antar-OPD di wilayah Temanggung sangat rawan terhadap gangguan fisik. Faktor cuaca ekstrem, bencana alam seperti tanah longsor, pohon tumbang,

dan kejadian lainnya sering kali menyebabkan kabel FO luar ruang putus, yang berdampak pada terganggunya stabilitas konektivitas birokrasi secara mendadak.

- d. Tingginya intensitas dan kompleksitas ancaman keamanan siber
Seiring dengan masifnya migrasi layanan ke sistem digital (SPBE), Dinkominfo dihadapkan pada ancaman siber yang kian agresif dan dinamis. Permasalahan ini meliputi serangan *ransomware*, *phishing*, hingga pemalsuan halaman (*web defacement*) oleh situs judi online yang menyusup ke subdomain resmi pemerintah daerah, yang menuntut pengawasan dan proteksi non-stop.
 - e. Kesenjangan kompetensi teknis dan tingginya rotasi SDM pengelola Data/PPID
Kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola TIK, statistik sektoral, dan PPID Pembantu di lingkungan OPD, kecamatan, maupun desa belum merata.
 - f. Rendahnya Partisipasi dan Komitmen Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Sebagai ujung tombak diseminasi informasi non-elektronik di tingkat desa, peran aktif KIM belum optimal dan masih fluktuatif. Karena kepengurusan KIM mayoritas bersifat sukarela, tingkat komitmen dalam memproduksi konten lokal dan menyebarluaskan kebijakan pemerintah daerah secara mandiri masih sangat bergantung pada stimulan dari luar.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah maupun pencapaian program nasional antara lain:
- a. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
 - 1) Belum optimalnya integrasi aplikasi turut memengaruhi pencapaian visi kepala daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, efektif, dan bebas pungli secara menyeluruh di semua lini OPD.
 - 2) Adanya area *blank spot* akibat kendala geografis berpasangan dengan kurang aktifnya KIM di pedesaan membuat sebaran kemajuan digital timpang. Masyarakat di lereng pegunungan tertinggal dalam mengakses peluang ekonomi digital dan informasi pembangunan, yang menjauhkan daerah dari visi pemerataan kesejahteraan.

- 3) Putusnya kabel FO secara mendadak atau terjadinya insiden peretasan situs web pemerintah daerah (*web defacement*) dapat melumpuhkan layanan publik elektronik seketika. Hal ini menurunkan indeks kepuasan masyarakat terhadap keandalan kepemimpinan kepala daerah dalam mengelola fasilitas publik.
- b. Dampak terhadap Pencapaian Program Nasional
 - 1) Menghambat pencapaian target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional.
 - 2) Mempersulit Akurasi Kebijakan Berbasis Data (Satu Data Indonesia); Keterlambatan penyeteroran data sektoral dan belum seragamnya *metadata* dari OPD produsen data berdampak langsung pada kualitas basis data daerah. Hal ini menghambat program nasional Satu Data Indonesia (SDI).
 - 3) Keterbatasan anggaran lisensi keamanan dan kelangkaan SDM ahli siber di tingkat daerah membuat simpul-simpul jaringan pemda menjadi titik lemah yang mudah disusupi peretas. Kerentanan pada sistem informasi Temanggung-CSIRT secara akumulatif dapat mempengaruhi stabilitas keamanan siber di tingkat nasional.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinkominfo, antara lain:
 - a. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan
 - 1) Perkembangan teknologi digital bergerak jauh lebih cepat daripada proses pembaruan regulasi daerah dan penyesuaian kompetensi aparatur ASN di lapangan.
 - 2) Serangan siber yang semakin canggih, terorganisir, dan bersifat masif menuntut Dinkominfo untuk selalu siaga memproteksi ratusan sistem elektronik tanpa henti.
 - 3) Proses peremajaan infrastruktur TIK, perluasan jaringan serat optik ke wilayah pelosok, serta pemeliharaan server Pusat Data Daerah membutuhkan biaya investasi yang sangat besar di tengah keterbatasan ruang fiskal APBD.
 - 4) Menghadapi karakteristik masyarakat Temanggung yang beragam, di mana kelompok masyarakat lansia atau warga di area geografis terpencil masih mengalami kesulitan beradaptasi dengan model layanan publik berbasis aplikasi mandiri.

- 5) Mengubah pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja sebagian aparatur sipil negara dari sistem birokrasi manual/konvensional berbasis kertas menjadi sistem kerja digital yang transparan dan serba cepat.
- b. Peluang dalam meningkatkan pelayanan
- 1) Dukungan kebijakan dari pemerintah pusat melalui Perpres SPBE dan Perpres Satu Data Indonesia memberikan legitimasi dan dorongan hukum yang kuat bagi Dinkominfo untuk memaksa keterpaduan sistem di seluruh OPD.
 - 2) Terbukanya peluang kemitraan strategis dengan operator seluler dan ISP swasta melalui skema kerja sama pemanfaatan aset untuk mengentaskan area *blank spot* secara efisien tanpa membebani APBD secara penuh.
 - 3) Peluang mengintegrasikan teknologi otomatisasi atau *AI* pada kanal aduan masyarakat dan layanan informasi PPID guna mempercepat waktu respons serta meringankan beban kerja admin.
 - 4) Potensi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Komunitas; Struktur sosial masyarakat Temanggung yang memiliki tradisi gotong royong kuat (seperti kelompok tani, pelaku UMKM, dan pemuda desa) dapat direvitalisasi menjadi agen literasi digital dan diseminasi informasi lokal yang mandiri.
5. Formulasi isu-isu penting
- Berdasarkan analisis komprehensif terhadap capaian IKU/IKK, kendala operasional, dampak pembangunan, serta pemetaan tantangan dan peluang, maka dirumuskan rekomendasi dan catatan strategis sebagai rujukan utama intervensi program/kegiatan Dinkominfo Kabupaten Temanggung pada tahun 2027 sebagai berikut:
- a. Sektor Aplikasi Informatika dan Tata Kelola Pemerintahan (SPBE)
- 1) Catatan Strategis: Hambatan utama reformasi birokrasi digital adalah belum optimalnya integrasi aplikasi akibat tingginya *silos* antar-OPD. Kondisi ini secara langsung memperlambat pencapaian Indeks SPBE Nasional dan menghambat visi Kepala Daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan bebas pungli.
 - 2) Rekomendasi Tindak Lanjut Kegiatan 2027
 - Memprioritaskan kegiatan integrasi seluruh aplikasi layanan sektoral OPD ke dalam satu portal layanan terpadu (*Super Apps* Kabupaten Temanggung).

- Menyusun instrumen pengawasan tata kelola TIK daerah yang melarang pembangunan aplikasi baru secara parsial oleh OPD tanpa melalui proses penapisan dan persetujuan dari Dinkominfo.
- Otomatisasi Layanan Aduan dengan mengembangkan peluang integrasi teknologi otomatisasi atau *Artificial Intelligence* (AI) pada kanal aduan masyarakat untuk mempercepat waktu respons layanan.

b. Sektor Infrastruktur TIK dan Pemerataan Jaringan Publik

- 1) Catatan Strategis: Kontur geografis Temanggung yang berbukit memicu adanya area *blank spot* di lereng Gunung Sindoro dan Sumbing, sehingga menciptakan ketimpangan digital pada masyarakat ekonomi rumah tangga. Di sisi lain, infrastruktur luar ruang berupa kabel serat optik (FO) antar OPD sangat rentan putus akibat cuaca ekstrem dan bencana alam (longsor/pohon tumbang) yang berpotensi melumpuhkan pelayanan publik elektronik seketika.
- 2) Rekomendasi Tindak Lanjut Kegiatan 2027
 - Memanfaatkan peluang kerja sama dengan operator seluler dan *Internet Service Provider* (ISP) swasta melalui skema pemanfaatan aset bersama untuk memperluas sinyal di area pelosok tanpa membebani APBD secara penuh.
 - Menyediakan jalur cadangan (*backup link*) atau peningkatan manajemen pemeliharaan preventif jaringan untuk mengantisipasi putusnya kabel FO luar ruang akibat bencana alam, demi menjaga stabilitas konektivitas birokrasi.
 - Mendesain infrastruktur pelayanan publik digital yang memiliki fitur kemudahan akses bagi kelompok masyarakat lansia atau warga yang gagap teknologi (*gaptek*).

c. Sektor Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)

- 1) Catatan Strategis: Pengukuran capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang terkendala waktu rilis dari KPI Provinsi Jawa Tengah menuntut Dinkominfo memperkuat fondasi pelayanan informasi sejak awal tahun. Isu krusial di lapangan menunjukkan masih tingginya rotasi SDM pengelola PPID Pembantu di tingkat OPD/Kecamatan serta belum optimalnya komitmen Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam memproduksi konten lokal.

2) Rekomendasi Tindak Lanjut Kegiatan 2027

- Revitalisasi KIM Berbasis Komunitas dengan memanfaatkan struktur sosial gotong royong masyarakat Temanggung (kelompok tani, pelaku UMKM, pemuda desa) sebagai agen literasi digital dan diseminasi informasi lokal yang mandiri.
- Standardisasi Kompetensi PPID; Menyelenggarakan pelatihan dan asistensi teknis berkelanjutan bagi pengelola PPID Pembantu untuk mengatasi dampak tingginya rotasi staf/aparatur di lingkungan pemerintah daerah.

d. Sektor Keamanan Informasi dan Persandian

- 1) Catatan Strategis: Masifnya migrasi ke sistem digital memicu tingginya intensitas ancaman siber yang agresif pada subdomain pemda. Kerentanan pada simpul jaringan daerah ini tidak hanya menurunkan kepuasan masyarakat terhadap keandalan fasilitas publik, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas keamanan siber di tingkat nasional.

2) Rekomendasi Tindak Lanjut Kegiatan 2027

- Mengalokasikan anggaran khusus untuk pemenuhan lisensi keamanan berstandar tinggi, penambahan kapasitas server Pusat Data Daerah, serta penguatan tim penanganan insiden siber secara non-stop.
- Audit Keamanan Sistem Berkala; Melakukan *vulnerability assessment* (uji celah keamanan) secara rutin terhadap seluruh subdomain resmi pemerintah daerah guna meminimalkan risiko penyusupan eksternal.

e. Sektor Statistik Sektoral dan Tata Kelola Data

- 1) Catatan Strategis: Keterlambatan penyetoran data serta belum lengkapnya metadata dari OPD produsen data berdampak langsung pada kualitas basis data pembangunan daerah, yang secara akumulatif menghambat program nasional Satu Data Indonesia (SDI). Kesenjangan kompetensi teknis aparatur dalam mengelola data menjadi akar utama permasalahan ini.

2) Rekomendasi Tindak Lanjut Kegiatan 2027

- Mengintensifkan forum Satu Data Kabupaten Temanggung dengan fokus kegiatan pada pendampingan penyusunan metadata, standar data, dan kode referensi bagi produsen data di setiap OPD.

- Menyelenggarakan program edukasi lintas sektor untuk mengubah pola pikir (*mindset*) aparatur sipil negara dari budaya kerja manual berbasis kertas menuju sistem kerja berbasis data digital yang valid (*evidence-based policy*).

Formulasi isu penting di atas menegaskan bahwa arah kebijakan Dinkominfo Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2027 difokuskan pada tiga pilar utama: Konsolidasi Sistem (*Interoperabilitas*), Proteksi Keamanan Siber, dan Pemberdayaan Kemitraan (KIM dan lainnya).

2.4. Telaah Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil kompilasi, penyelarasan, dan telaah teknis terhadap usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung yang masuk melalui sistem informasi perencanaan daerah, dapat diinformasikan bahwa pada Tahun Anggaran 2027 tidak terdapat alokasi program maupun kegiatan yang bersumber dari Pokir DPRD pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Meskipun pada Tahun Anggaran 2027 tidak terdapat mata anggaran spesifik yang berlabel Pokir DPRD, Dinkominfo tetap berkomitmen penuh untuk mengawal aspirasi keterbukaan informasi dan digitalisasi pelayanan di seluruh daerah pemilihan melalui pelaksanaan program/kegiatan reguler yang melekat pada tugas pokok dan fungsi dinas.

2.5. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan sub-kegiatan di luar rancangan awal Dinkominfo, sejumlah 4 (empat) sub-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sub-kegiatan baru pada Program Penunjang dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 900.000,- untuk menghasilkan 7 Dokumen Perencanaan.
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub-kegiatan baru pada Program Penunjang dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 600.000,- untuk menghasilkan 11 Dokumen Laporan Evaluasi.

- c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Sub-kegiatan baru pada Administrasi Kepegawaian dengan target 7.000 orang. Sub-kegiatan ini mendapat tambahan pagu dari dana DBHCHT sebesar Rp. 487.638.221,-.
 - d. Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Merupakan sub-kegiatan gabungan baru di bawah Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan kebutuhan dana Rp. 753.500.000,- (target 559.689 orang terpapar informasi)
2. Terjadi pergeseran pagu & penyesuaian anggaran, yaitu:
- a. Penyesuaian pagu Gaji ASN
Pada Ranwal, sub-kegiatan *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* bernilai Rp. 0 (belum teralokasi), namun pada hasil analisis kebutuhan disesuaikan menjadi Rp. 4.028.710.048,-. Hal inilah yang menjadi faktor naiknya anggaran belanja penunjang urusan.
 - b. Penghapusan dan pergeseran pagu anggaran
Pada Program Informasi dan Komunikasi Publik, dua sub-kegiatan Ranwal (*Diseminasi Informasi* senilai Rp. 32,5 juta dan *Pengelolaan Media Komunikasi Publik* senilai Rp. 721 juta) dihilangkan secara mandiri. Seluruh pagu anggarannya digeser/disatukan secara utuh ke dalam sub-kegiatan baru (*Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik*) dengan total nilai Rp. 753.500.00,-.
 - c. Efisiensi belanja rutin kantor
Terjadi penurunan pagu tipis pada pos *Administrasi Umum* (dari Rp. 405,4 juta menjadi Rp. 398,7 juta) dan *Jasa Penunjang* (dari Rp. 1,402 miliar menjadi Rp. 1,370 miliar) karena penyesuaian efisiensi harga riil di lapangan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2027

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					4.473.920.142	I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					8.990.268.411	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					2.077.201.542	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					6.555.614.053	
							1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.500.000	
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dok.	900.000	Penambahan sub kegiatan baru
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	Dok.	600.000	Penambahan sub kegiatan baru
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					-	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.028.710.048	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung				-		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			4.028.710.048	Penyesuaian pagu gaji ASN
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					84.000.000	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					571.358.221	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Temanggung	Jumlah paket kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi bagi Programmer	1	paket	84.000.000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Temanggung	Jumlah paket kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi bagi Programmer	9	orang	83.720.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Temanggung				-		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	7000	orang	487.638.221	Tambahan pagu dari

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
										Peraturan Perundang – Undangan				dana DBHCHT
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					405.406.058	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah					398.752.800	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	paket	8.656.058		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	paket	8.654.400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket	127.500.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket	125.461.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	paket	97.800.000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	paket	97.798.400	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	paket	44.900.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	paket	40.305.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	14.200.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	14.200.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	31.600.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	31.600.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	80.750.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	80.734.000	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.402.795.484	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.370.292.984	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	750.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	750.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	6.650.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	6.650.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	laporan	64.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	laporan	63.715.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	1.331.395.484		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	1.299.177.984	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					185.000.000	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					185.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	laporan	185.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	laporan	185.000.000	
B	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					753.500.000	B	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					753.500.000	
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					753.500.000	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					753.500.000	